



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHLIS NATSIR**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELASI I JAYAPURA**
3. NHK : **94472**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.670.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.085.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 965.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 622.900.000

1. MOTOR, HONDA FIT S SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.150.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO GT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.750.000
3. MOTOR, KAWASAKI LX 50G DUA TAG Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
4. MOBIL, DATSUN GO PANCA T1.2 M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 77.500.000
5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 57.105.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 149.142.332

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.499.147.332



III. HUTANG

Rp. 936.356.079

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.562.791.253

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.